



Logika Kepantasan di Sangihe-Talaud: Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam INDEX-SATAL

Kevin Rafif Feliatra

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

INDEX-SATAL (Indonesian Exploration–Sangihe-Talaud Expeditions) is a cooperation led by the United States to explore Sangihe-Talaud, region in Indonesia, which is very rich in deep sea’s natural resources. This collaboration is a form of Marine Scientific Research. The main problem in this issue is that the US has a bad reputation in international sea regime and historically had eroded the wealth of Indonesian mines. This research then discuss why Indonesia continues to accept United States despite these risks. This research uses the perspective of the Logic of Appropriateness, which explains that state will do something that fulfills moral obligations that come from such situations, identity, role, and membership in political community. The research method is explanative by using literature reviews. The result show that the US was accepted by Indonesia due to the alignment of situation and Indonesia’s identity, the role of Indonesia as UNCLOS’ ratified country, and Indonesia’s moral responsibility as a maritime nation.

Keywords: *Indonesia, United States, INDEX-SATAL, Marine Scientific Research, Logic of Appropriateness.*

PENDAHULUAN

Identitas Indonesia sebagai negara maritim telah lama tercatat dalam sejarah Indonesia. Dalam hal ini, masuk dan berkembangnya kerajaan-kerajaan agama Hindu, Budha, dan Islam di Indonesia memegang peran penting. Pada masanya, kekayaan sumberdaya alam seperti rempah, karet, dan kayu wangi serta letak geografis yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa lain tertarik untuk masuk dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. (Yuliati, 2014). Pada era modern, gagasan Indonesia sebagai negara maritim diawali dengan rumusan “Asas Archipelago” dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 sebagai bentuk landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian Indonesia secara utuh. Kemudian, Indonesia terus berusaha untuk melakukan diplomasi di lingkup internasional demi mendapat pengakuan terhadap konsep tersebut. Hasilnya baru didapat 25 tahun setelahnya, yaitu dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention of the Law of the Sea*), yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika, pada 10 Desember 1982, dan dikenal dengan sebutan UNCLOS (Sulistyo, 2016).

Mewarisi identitas maritim berdasarkan sejarah, letak geografis yang strategis dibuktikan dengan keberadaan empat dari tujuh selat Indonesia yang merupakan jalur yang sangat penting secara politik dan ekonomi. Selat-selat tersebut adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Menurut ahli geostrategi, Fika Komara, jalur-jalur tersebut adalah bentengan garis energi minyak dan gas bumi yang tidak boleh terputus karena peran pentingnya untuk dunia industri (Ambari, 2013). Kekayaan sumberdaya kelautan juga ditunjukkan dengan adanya potensi pemanfaatan 84,48 miliar barrel minyak di cekungan-cekungan tersier lepas pantai dan laut dalam (Kompas, 2003). Selain itu, Indonesia memiliki biodiversitas kelautan yang tinggi dilihat dari 2.057 spesies ikan terumbu karang, 120 spesies hiu, kedua spesies pari manta, enam spesies penyu laut, dan berbagai jenis paus dan lumba-lumba yang menghuni lautnya (ICEL, 2019). Potensi hasil tangkap sumberdaya ikan di laut Indonesia pun amat tinggi, dengan berada pada kisaran 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di perairan internal dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Humas Sekretariat Kabinet, 2016).

Kekayaan laut Indonesia membuat banyaknya entitas asing masuk untuk meneliti fenomena-fenomena yang terkandung di dalamnya. Hal ini tanpa sadar membawa konsekuensi akan bocornya data-data negara yang seharusnya tidak jatuh ke pihak asing. Sebab bukan informasi dan potensi sumberdaya alam saja yang dapat diketahui, namun juga informasi tentang medan laut yang dapat disalahgunakan untuk menguntungkan negara peneliti secara sepihak dan merugikan Indonesia di wilayahnya sendiri. (Nurhayat, 2018). Di lain pihak, Indonesia dihadapkan pada ketidakpekaan terhadap sumberdaya yang dimiliki karena minimnya teknologi dan tenaga ahli terkait.

Sangihe-Talaud, dua kabupaten kepulauan di bagian Sulawesi Utara, merupakan lokasi yang memiliki daya tarik tinggi. Menurut penelitian sebelumnya, kedalaman laut Sangihe-Talaud memiliki kandungan migas dan mineral hidrotermal (perak, tembaga, seng dan timbal) yang tinggi, serta keragaman hayati laut yang luar biasa. (GeoMagz, 2015). Kerjasama *marine scientific research* (MSR) atau penelitian ilmiah kelautan dengan Amerika Serikat lewat *Indonesian Exploration–Sangihe-Talaud Expeditions* (INDEX-SATAL) menjadi fokus utama penelitian ini. INDEX-SATAL adalah kerjasama menjelajahi kedalaman perairan Indonesia yang dipimpin oleh peneliti asal Amerika Serikat. Ekspedisi ini dilakukan sejak 24 Juni hingga 8 Agustus 2010. Tujuan dari ekspedisi penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman tentang ekosistem bawah laut, terutama yang berkaitan dengan gunung api bawah laut dan lubang hidrotermal, yang memiliki potensi melimpah dalam ketersediaan minyak, gas, berbagai kandungan mineral serta keanekaragaman hayati laut dalam. (Potter, 2010).

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang secara terbuka tidak meratifikasi rezim UNCLOS karena mengaku memiliki ketentuan dan hukum nasional sendiri mengenai hal tersebut. Perbedaan payung hukum yang menaungi AS dalam rezim laut internasional, menghasilkan paradigma tidak diindahkannya ketentuan hukum dan prinsip yang tertera di dalamnya. Di sisi lain, apabila membahas kekayaan mineral di Sangihe-Talaud, AS memiliki jejak historis yang kelam karena pernah menggerus kekayaan tambang Indonesia di Papua dan menyebabkan segala polemiknya. Hal-hal tersebut menjadi resiko-resiko dalam menjadikan Amerika Serikat sebagai partner kerjasama ini. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan mengapa Indonesia tetap menerima Amerika Serikat untuk melakukan penelitian dan mengeksplorasi perairannya meski mendapati segala resiko-resiko yang telah disebutkan.

PEMBAHASAN

Kekayaan Laut Indonesia dan Reputasi Buruk AS dalam Rezim Laut Internasional

Kerjasama *Indonesian Exploration–Sangihe-Talaud Expeditions* (INDEX-SATAL) adalah kerjasama eksplorasi laut dalam yang mencakup hidrotermal, vulkanologi, pemetaan dasar laut, oseanografi, karakterisasi habitat laut, flora-fauna laut dalam, potensi mineral, hingga teknologi eksplorasi laut. Kerjasama ini merupakan inisiasi dari Amerika Serikat sebagai bagian dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKP dengan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) pada 18 September 2007 tentang kerjasama riset, teknologi, dan aplikasi di bidang kelautan dan perikanan. Adapun permintaan izin oleh AS untuk mengeksplorasi laut Indonesia ini baru didapat tiga tahun kemudian, yaitu pada 24 Juni hingga 8 Agustus 2010 (Metro TV News, 2010).

Perairan Sangihe-Talaud merupakan salah satu wilayah Indonesia yang sudah seperti harta karun yang menarik kepentingan asing. Sebelum Amerika Serikat masuk melalui INDEX-SATAL, Australia telah melakukan Ekspedisi IASSHA (*Indonesia-Australia Survey for Submarine Hydrothermal Activity*) terlebih dulu. Dalam penelitian tersebut, diungkap bahwa kawasan dasar laut perairan Sangihe-Talaud merupakan lokasi yang memiliki daya tarik tinggi. Diperkirakan perairan Sangihe-Talaud memiliki jumlah endapan minyak dan gas sebesar 6,6 miliar m³, sumber cebakan emas dengan kandungan 0,5 s.d 1 gram/ton Au, sumber mineral logam hidrotermal lainnya yaitu perak, tembaga, seng dan timbal, serta keragaman hayati laut dan spesies-spesies yang baru ditemukan (GeoMagz, 2015). Memiliki potensi perairan sedemikian besar menjadi berkah yang menguntungkan namun juga tantangan bagi Indonesia karena rawan untuk diinfiltrasi negara lain. Amerika Serikat yang kemudian datang dan menjalin kerjasama eksplorasi, diyakini penulis memiliki resiko-resiko untuk Indonesia dari segi konstitusional dan catatan sejarah yang buruk.

Secara khusus, Amerika Serikat adalah negara non ratifikasi yang paling vital untuk UNCLOS. UNCLOS sendiri adalah kerangka hukum untuk kegiatan kelautan, dengan Majelis Umum PBB sebagai badan politik yang legal menanganinya. (IUCN, 2008). Alasan dari vitalnya AS ini adalah posisinya sebagai negara adidaya yang menolak untuk meratifikasi karena menilai konvensi tersebut terlalu banyak memberi keuntungan pada negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Di awal penerapan rezim tersebut, Presiden Reagan kala itu menganggap bahwa aturan dalam UNCLOS merupakan lanjutan dari peraturan dan *customary law* yang mereka miliki. Di sisi lain, AS telah mengintegrasikan beberapa ketentuan UNCLOS dalam hukum domestik mereka, misalnya Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Sampai saat ini, hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang Senat, selaku pengambil keputusan, secara konsisten memblokir usulan-usulan ratifikasi (Brown Political Review, 2018).

Salah satu hukum domestik Amerika Serikat tersebut bernama *Deep Seabed Hard Mineral Resources Act* (DSHMRA). DSHMRA diciptakan pada bulan Juni 1980, atas dasar perizinan terhadap warga negara atau perusahaan mereka untuk mengeksplorasi dan menambang dasar laut. Menurut Steven Groves, dengan tidak meratifikasi UNCLOS, Amerika Serikat mengartifimasi posisinya yang meyakini bahwa dasar laut merupakan hak bebas setiap negara, serta menilai bahwa meratifikasi UNCLOS hanya akan menghambat kepentingan dikarenakan royalti, pajak, prinsip *Common Heritage of Mankind*¹, dan sejenisnya (Holmes, 2011). Pandangan ini menjadi titik awal dari resiko dilanggar dan disalahgunakannya UNCLOS oleh Amerika Serikat yang tidak dibawah hukum internasional (Groves, 2012). Adapun segala kegiatan eksplorasi laut masuk ke dalam *Marine Scientific Research* (MSR), yang juga merupakan bagian dari hak-hak yang ada dalam UNCLOS. UNCLOS menganggap peraturan

¹ Prinsip *Common Heritage of Mankind* berarti bahwa negara yang meratifikasi UNCLOS diwajibkan untuk berbagi segala potensi alam dalam kegiatan tersebut kepada negara berkembang

dalam MSR sebagai bagian dari prinsip *Common Heritage of Mankind* (Guy, 2005). Ini berarti, bila AS dijadikan partner kerjasama oleh Indonesia, prinsip tersebut berpotensi tidak dilaksanakan dan hasil kegiatannya dapat dimanfaatkan secara sepihak.

Tidak ratifikasinya Amerika Serikat terhadap UNCLOS tentu menciptakan adanya persepsi yang berbeda dengan negara-negara yang dibawah rezim. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran hukum MSR dan konservasi laut di wilayah ZEE Cina dengan alasan *freedom of navigation* (Valencia, 2018). Contoh lainnya adalah klaim wilayah mereka di Arktik yang selain tidak dibawah rezim, juga agresif menggunakan armada militer disebabkan prediksi wilayah tersebut untuk menjadi lalu lintas laut baru pada 2030 dan memiliki 25 persen sumber daya minyak dan gas alam dunia menurut Survei Geologi pemerintahnya pada tahun 2008 (Stratfor, 2015). Tindakan-tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tidak hormat terhadap rezim laut internasional, yang tentu menjadi resiko dari entitas mereka dalam menjalin kerjasama bilateral.

Dari segi eksploitasi sumberdaya alam, Amerika Serikat juga terlibat insiden ketika Brazil mengizinkan perusahaan AS, Chevron, untuk mengeksplorasi di perairan Campos Basin. Namun eksplorasi ini dicoreng dengan tercemarnya 157.000 galon minyak di perairan mereka. Sekretaris Lingkungan Rio de Janeiro, Carlos Minc, mengkritik kontraktor pengeboran Chevron dan menuduh perusahaan itu terlalu berusaha mengebor pada tekanan yang terlalu tinggi, seolah tidak peduli terhadap karakteristik geologis dasar laut. Berbagai insiden yang telah terjadi, merupakan cermin bagaimana Amerika Serikat benar-benar agresif memenuhi kebutuhan sumberdaya alamnya tanpa pandang bulu. Inilah yang penulis pandang menjadi resiko lain dalam kerjasama riset dan eksplorasi laut dalam pada INDEX-SATAL dan segala penelitian serupa setelahnya. (CNN, 2011).

Adapun pada tahun 2000-an, persaingan untuk mendapatkan sumberdaya tak terbarukan, seperti minyak dan mineral semakin intensif sejak negara pemasok, salah satunya Amerika Serikat, menjadi konsumen utama. Mekanisme kebutuhan terhadap sumberdaya ini membuat terjadinya kelangkaan, yang mengakibatkan permintaan dan harganya meningkat (Popp, 2018). Pada tahun 2020, 5% dari mineral di dunia, termasuk kobalt, tembaga dan seng diprediksikan dapat dihasilkan dari dasar laut. Di dasar laut, terdapat tiga kelompok mineral pokok yang tersedia, yaitu: nodul polimetalik, polimetalik sulfida dan kerak ferromangan. Tiga kelompok tersebut memiliki kandungan mineral yang sangat berguna seperti kobalt, perak, vanadium, mangan, timbal, emas, nikel, perunggu, seng dan berbagai mineral lainnya (Nugroho, 2016). Mineral tersebut dapat ditemukan di kedalaman 1.400-3.700 meter dan terkonsentrasi di daerah vulkanisme. Hal inilah yang menimbulkan euforia untuk menemukan sumberdaya tersebut di dasar laut.

Laut dalam Sangihe-Talaud diketahui memiliki kandungan emas sebesar 0,5 s.d 1 gram/ton Au, berbagai sumber mineral logam hidrotermal lainnya yaitu perak, tembaga, seng dan timbal, serta jumlah endapan minyak dan gas sebesar 6,6 miliar m³. Rasanya, sulit untuk mengabaikan fakta-fakta tersebut yang menunjukkan bagaimana menggiurkannya kekayaan di wilayah tersebut untuk dieksploitasi. Apalagi bila melihat agresifnya AS dalam eksploitasi sumberdaya alam serta sejarah telah menggerus kekayaan di tanah Papua melalui PT Freeport Indonesia. (Wicaksono, 2017).

PT. Freeport menimbulkan banyak polemik, seperti pembagian keuntungan yang tidak proporsional, kegagalan pembaharuan agrarian, dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Kementerian ESDM bahkan sempat menyindir keras Freeport untuk tahu diri jika mereka tidak berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Meski mengatasnamakan

perusahaan multinasional, keterkaitannya dengan negara asal tentu masih satu jalur dalam aspek pemenuhan kebutuhan konsumsi sumberdaya serta pemasukan negara. Berdasarkan data Freeport-McMoran per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu. Freeport Indonesia membukukan pendapatan US\$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US\$4,8 miliar. (Wibowo, 2010). Adapun ketika terjadi proses divestasi saham PT Freeport Indonesia yang rampung pada 21 Desember 2018 lalu, hal tersebut diwarnai *psywar* dengan mengirimkan pasukan ke dekat Australia yang dilakukan oleh AS untuk mengawal kepentingan mereka tersebut. Dari sini dapat dilihat bagaimana keterkaitan pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan asalnya bukanlah main-main. Sifat agresif dengan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan atau bahkan merugikan negara pemilik sumberdaya alam pada berbagai aspek patut diperhatikan.

Logika Kepantasan Indonesia dalam Kerjasama INDEX-SATAL dengan Amerika Serikat

Keterbatasan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang mumpuni, memang membuat Indonesia diharuskan untuk bekerjasama dengan negara lain untuk terus menjunjung identitas negara maritim yang diembat. Amerika Serikat pun masuk menawarkan teknologi mutakhir dan para ahli di bidangnya. Akan tetapi, resiko-resiko yang telah dijabarkan menunjukkan AS sebenarnya tidak kredibel untuk dijadikan partner dalam mengeksplorasi laut. Oleh karenanya, alasan dibukanya Sangihe-Talaud untuk Amerika Serikat tidak dapat lagi didasari pada analisis untung rugi semata, melainkan logika kepantasan yang mengacu pada perbuatan yang dirasa benar dan patut dicontoh. Pada intinya terdapat tiga hal yang menjadi pasak dari dilakukannya logika kepantasan. Pertama, logika kepantasan didasarkan pada situasi dan identitas. Kedua, mengaitkannya pada identitas kelembagaan atau peraturan. Ketiga, didasarkan pada tuntutan moral. Hal-hal ini dikatakan March, membentuk titik referensi penting dalam pilihan individu dan kelompok, atau dalam konteks ini, negara (March & Olsen, 2004).

Penyelarasan Situasi dan Identitas Indonesia sebagai Negara Maritim: Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan negara yang memprakarsai *Coral Triangle Initiative (CTI)* dengan merangkul Filipina, Malaysia, Timor Timur, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. CTI bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup dan mempertahankan kesinambungan kekayaan laut di kawasan keenam negara tersebut. Indonesia juga didapik sebagai ketua dari *Council of Minister CTI* pada tahun 2010-2011. Adapun Sangihe-Talaud, bagian dari kawasan *coral triangle*, meski telah mendapat data kekayaan laut materil melalui IAASHA, kekayaan biodiversitasnya belum diketahui. Kedua hal ini menjadi premis awal dari situasi Indonesia kala itu.

Tidak diketahuinya kekayaan sumberdaya alam di perairan Sangihe-Talaud tentu kontras dengan tujuan CTI yang ingin mengelola dan mempertahankan kekayaan laut di wilayah tersebut, sehingga permintaan Amerika Serikat untuk mengeksplorasi laut di daerah tersebut berjalinkelindan dengan situasi yang ada (Embassy of the Republic Indonesia in Washington, 2017).

Ini menjadi alasan kuat mengapa INDEX-SATAL dapat dilaksanakan. Apabila dilihat melalui logika kepantasan, sikap yang diambil Indonesia merupakan bentuk perilaku yang memang selayaknya dilakukan karena posisi mereka sebagai ketua dalam CTI dan karenanya hal ini adalah sesuatu yang natural dan terlegitimasi. Di sisi lain, situasi tersebut juga sesuai

dengan identitas sebagai negara maritim yang diembat Indonesia. Sebagaimana disebutkan March dan Olsen, bahwa negara akan melakukan suatu hal yang memenuhi kewajiban moral yang berasal dari identitas dan keanggotaan dalam suatu komunitas politik serta menyesuaikannya dengan tujuan dan kepentingan dalam situasi tertentu (Kříž & Urbanovská, 2013).

Menurut salah seorang pakar maritim, Son Diamar, ada tiga aspek yang menjadi modal utama dalam penguatan pembangunan negara maritim modern di Indonesia. Pertama, peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. Kedua, pembangunan industri maritim guna memberikan kontribusi akan keberadaan negara maritim yang modern dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, penataan ruang wilayah maritim, yang menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau yang berwawasan lingkungan.

Pada pilar pertama, disebutkan bahwa Indonesia perlu kembali memahami kondisi geografisnya sebagai negara maritim. Bila berfokus pada wilayah Sangihe-Talaud, perairan kedua kabupaten kepulauan tersebut telah diketahui amat kaya akan berbagai sumberdaya alam. Namun, potensi perairan paling dasarnya, yakni perikanan, belum maksimal. Dalam data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sekitar 34.000 ton per tahun atau setara dengan 9% dari potensi total WPPNRI² 716. Dari potensi tersebut, yang baru termanfaatkan berdasarkan data 2014 adalah 8.502 ton atau baru sekitar 25%. Sedangkan potensi perikanan tangkap Talaud adalah sekitar 67.752 ton atau setara dengan 17,5% dari potensi total WPPNRI 716. Dari potensi tersebut, yang baru termanfaatkan berdasarkan data 2013 adalah 10.137 ton per tahun atau baru sekitar 15% dari potensi yang ada (Setiawan, 2016).

Hal ini pun menemui titik terang ketika penyebaran ikan laut dalam di wilayah Sangihe-Talaud ditemukan pada tahun 2014 dengan mengeksplorasi sumberdaya ikan laut berdasarkan data yang ditemukan dalam INDEX-SATAL. Dalam eksplorasi tersebut, terdapat tujuh lokasi penangkapan yang menemukan gerombolan ikan di lokasi *sampling* (Satria, 2012). Penemuan ikan komersil ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat sekitar dan diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup mereka serta memaksimalkan potensi perikanan yang ada. Di samping itu, hasil penemuan dan segala data yang dihasilkan dalam INDEX-SATAL berusaha diolah dalam bentuk tindak lanjut dari mitigasi dan adaptasi bencana karena kondisi geodinamika aktif yang posisinya berada pada kelerengan dasar laut. (Troa, 2017).

Pada pilar kedua, diperlukannya pembangunan berbasis maritim yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan mengetahui kondisi laut dalam Sangihe-Talaud, pemerintah dapat mengambil ancang-ancang untuk melakukan hal tersebut. Ini penting untuk sesegera mungkin diwujudkan karena apabila dibandingkan, negara-negara maju telah memanfaatkan laut dalam untuk berbagai pembangunan sarana infrastruktur seperti terowongan (*tunnel*), jaringan komunikasi, distribusi energi, dan sumber pangan (Troa, 2017). Salah satu teknologi yang diterapkan dalam eksplorasi ini adalah pemetaan topografi dasar laut dengan menggunakan *multi-beam echosounder* yang dapat menghasilkan citra tiga dimensi formasi dasar laut. Teknologi menarik lainnya adalah digunakannya ROV (*Remotely Operated Underwater Vehicle*), robot yang dapat merekam gambar atau video dalam laut dengan resolusi tinggi, yang pengoperasiannya dikendalikan dari kapal di permukaan (Troa, 2017). Oleh karenanya, dapat dilihat bagaimana bentuk dan situasi laut dalam di wilayah Sangihe-Talaud

² Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

beserta potensi besar yang berada di dalamnya. Ini dapat dijadikan langkah awal yang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maritim dengan pemanfaatan laut dalam yang optimal.

Pilar ketiga, penataan ruang wilayah maritim. Setelah dilaksanakannya INDEX-SATAL, urgensi merancang penataan ruang maritim menjadi begitu vital. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasukkan Sangihe-Talaud dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diproyeksikan pada tahun 2011-2031. Disisi lain, potensi pariwisata juga telah direkognisi dan berusaha terus dikembangkan oleh pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan Gunung Api Bawah Laut Mahangetang milik Sangihe masuk dalam proyek Pengembangan Kawasan Wisata Kota Bahari. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Peran Indonesia sebagai Negara Peratifikasi UNCLOS: March dan Olsen menyebutkan bahwa sebuah institusi atau lembaga adalah kumpulan aturan dan praktik yang di dalamnya terdapat struktur yang menjelaskan dan menjustifikasi perilaku, peran, identitas, tujuan bersama, dan hal-hal yang bersifat normatif. Perspektif yang didasari kelembagaan sangat kontras dengan interpretasi politik yang mengasumsikan bahwa negara hanya mementingkan diri sendiri dan menganalisis semuanya berdasarkan analisis untung rugi yang hanya mencerminkan kepentingan dan kekuatan. Lebih jauh, peraturan yang dibawah institusi dipandang sebagai sebuah jalan untuk menentukan tindakan yang paling tepat (March & Olsen, 2004). Logika kepantasan merupakan tata pengambilan keputusan yang tidak semata-mata opportunistik, namun juga altruis. Dengan kata lain, negara akan berperilaku dengan mempertimbangkan nilai, norma, dan kemaslahatan masyarakat dunia. Sikap etik tersebut dilakukan karena semua yang telah terkonstitusi di lingkungan atau organisasi internasional diyakini sebagai pikiran paling rasional yang akan bermanfaat untuk kesejahteraan bersama.

Telah disebutkan bahwa MSR merupakan suatu hal yang berkonsep sebagai *Common Heritage of Mankind*, yang berarti segala temuan dalam penelitian tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kedua negara saja, namun dunia secara keseluruhan. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa INDEX-SATAL membagikan temuannya pada dunia melalui tayangan gambar hidup dengan resolusi tinggi yang diperoleh dari ROV, yang menyediakan cuplikan-cuplikan dari kedalaman laut Sangihe-Talaud. Hal ini juga dapat disaksikan langsung oleh para ilmuwan dan masyarakat internasional melalui situs resmi eksplorasi INDEX-SATAL. Apabila dikaitkan dengan *Coral Triangle Initiative* yang dipimpin Indonesia, mengacu pada perkataan Narmoko Prasmadji, selaku *Executive Secretary* CTI, organisasi tersebut jelas menyokong UNCLOS. Salah satu prinsip dalam CTI menyebutkan: “*CTI should support people centered biodiversity conservation, sustainable development, poverty reduction and equitable benefit sharing;*” Pada prinsip tersebut terdapat unsur altruisme yang sejalan dengan konsep *Common Heritage of Mankind* milik UNCLOS dalam penyebutan “*equitable benefit sharing*”.

Adapun seluruh hasil penelitian yang didapat dalam eksplorasi tahun 2010 itu masih terus dikembangkan dalam konteks berbagai cabang ilmu pengetahuan hingga saat ini. Misalnya dari segi geografis, pergerakan lempeng bawah laut di kedua kabupaten kepulauan tersebut memiliki geodinamika yang sangat kompleks yang sangat jarang terjadi (Satria, 2012). Kondisi ini diwarnai fakta adanya gunung-gunung dasar laut tersebut masih aktif. Dalam penelitian tersebut, ditemukan enam gunung berapi di bawah permukaan laut, dengan Gunung Api Kawio, yang diketahui sebagai gunung api aktif dasar laut tertinggi di dunia. (Rachman, 2010).

Hasil penelitian lainnya adalah ditemukannya dari 53 spesies ikan laut dalam. Beberapa jenis ikan laut dalam tersebut diyakini memiliki nilai ekonomis. Jenis ikan tersebut memiliki jumlah besar dan berpotensi untuk dimanfaatkan demi kepentingan komersil. Lebih jauh, juga dijumpai beberapa biota laut lainnya yang belum diberi nama dan masih diteliti lebih lanjut

(Satria, 2012). Penemuan-penemuan biota baru dalam ekspedisi ini sebenarnya juga menaruh harap pada bidang kesehatan, karena laut memiliki berbagai jenis senyawa bioaktif baru yang tidak ditemukan pada biota darat. (Rasyid, 2008).

Tanggung Jawab Moral Indonesia sebagai Negara Maritim: March dan Olsen menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan negara didorong oleh anggapan perilaku yang benar, pantas, dan patut dicontoh. Hal tersebut diatur dalam tuntutan formal -melalui peraturan-dan informal -secara nilai dan norma- yang harus dipatuhi karena mereka terlihat 'natural', diharapkan, dan terlegitimasi. Oleh karenanya, negara merupakan agen moral yang tidak dapat lepas dari tuntutan benar dan salah. Dalam konteks politik internasional, selain tuntutan moral, terdapat indikasi bahwa negara melakukan hal tersebut disebabkan oleh keinginan untuk dipandang baik oleh negara ataupun aktor lainnya (March & Olsen, 2004).

Adapun segala perilaku moralis tersebut tidak lepas dari adanya peran dan identitas yang diembat oleh negara. Lebih lanjut, peran dan identitas tersebut menghasilkan adanya tanggung jawab. Dalam hal moral, tanggung jawab yang dimaksud adalah berperilaku baik atas dasar tujuan dan kemaslahatan bersama (Hart, 1968). Peran dan identitas yang dimiliki suatu negara nantinya akan sesuai dengan porsi tanggung jawab moral yang seharusnya dilakukan. Sebagaimana terdapat frasa yang umum digunakan dalam Ilmu Hubungan Internasional bahwa, "*With great power comes great responsibility.*" Konstruktivis menekankan bahwa *great power* dapat didefinisikan dalam identitas dan interaksi sosial. Seperti dikatakan Brittingham, "*being a great power is an identity that must be enacted by a state, and recognised and reinforced by its peers.*" (Brittingham, 2007). Keadaan yang menghubungkan status *great power for great responsibility* ini telah tercermin dalam dunia internasional selama berabad-abad, yang juga berkaitan dengan prestise, imej, dan reputasi. Ketiganya menjadi hal penting dalam tujuan dipandang baik di dunia internasional. Dampak negatif dari reputasi yang buruk dapat mencoreng kredibilitas, legitimasi, dan imej internasional. Hal-hal tersebut amat vital apabila dikaitkan dengan hubungan antar negara dan *soft power*.

Dalam kasus kerjasama INDEX-SATAL, frasa "*with great power comes great responsibility*" juga menggambarkan dengan status identitas Indonesia sebagai negara maritim yang besar, yang berujung dengan dimilikinya tanggung jawab moral yang besar pula. Kebesaran laut Indonesia dapat dilihat dari perairannya yang menjadi bagian utama dalam kawasan *coral triangle*, yang diketahui merupakan "*Amazon of the seas*" karena memiliki kekayaan sumberdaya yang luar biasa. Di wilayah Sangihe-Talaud Kekayaan tersebut di rangkum dengan adanya sumber migas, emas, dan mineral logam hidrotermal lainnya serta keragaman spesies laut yang luar biasa.

Adapun semua kekayaan tersebut masih mengawang dan belum dimanfaatkan secara nyata. Di sisi lain, potensi yang sedemikian besar tentu saja menaruh harap untuk dimanfaatkan tidak hanya oleh Indonesia, namun dunia secara keseluruhan. Oleh karenanya, dalam kasus permintaan Amerika Serikat untuk mengeksplorasi laut dalam di wilayah Sangihe-Talaud, tindakan yang diharapkan pada Indonesia tentu adalah membuka laut dan membagikan manfaatnya pada dunia. Melihat terbukanya sistem eksplorasi ini untuk dimanfaatkan dalam berbagai aspek, tentu menciptakan citra dan reputasi baik bagi Indonesia di dunia internasional.

Segala penemuan dalam kerjasama MSR di Sangihe-Talaud dapat dikatakan sebagai hadiah dari Indonesia pada dunia. Bila dielaborasikan, dijumpainya spesies-spesies baru di wilayah tersebut merupakan terobosan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebagaimana Verena Tunnicliffe, seorang profesor di University of Victoria di Kanada mengatakan bahwa

hasil penelitian dalam INDEX-SATAL memberikan gambaran luar biasa pada salah satu ekosistem laut paling kompleks di dunia (McDowell, 2010).

Menurut March dan Olsen, apabila perilaku suatu negara teramat berkesan maka akan menciptakan persepsi yang baik dimata negara lainnya, dan hal sebaliknya juga berlaku demikian (March & Olsen, 2004). Perilaku moralis Indonesia yang membiarkan lautnya dieksplorasi serta fakta bahwa laut Indonesia memiliki potensi sedemikian besar dinilai telah membuat Amerika Serikat melakukan langkah sejalan meskipun bukan sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS dan memiliki latar belakang yang tercoreng dalam rezim laut internasional dan eksploitasi sumberdaya alam.

Dalam hasil wawancara Catherine Clabby, salah seorang jurnalis dalam *American Scientist*, dengan Stephen Hammond, ketua dari INDEX-SATAL, terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat melihat dibukanya wilayah perairan tersebut adalah berkah bagi ilmu pengetahuan. Disisi lain, potensi endapan minyak dan gas beserta mineral berharga lainnya yang ada di Sangihe-Talaud dapat menjadi jawaban dari kondisi sumberdaya tak terbarukan yang akan menemui titik langka dan habis dalam kurun waktu tertentu. Bukan tidak mungkin apabila akan dikelola di masa depan nantinya, wilayah ini akan melayani ketergantungan dunia yang terus meningkat. Melihat hal-hal tersebut, penulis beranggapan bahwa resiko-resiko yang ada dapat ditekan dikarenakan AS sejatinya telah memberi hormat pada kemegahan laut Indonesia. Lebih jauh, penulis meyakini bahwa kerjasama INDEX-SATAL menjadi landasan kerjasama berkelanjutan kedua negara dalam bidang kelautan hingga saat ini.

Bila ditelaah kembali, sebagai negara maritim yang besar, Indonesia telah mengizinkan AS mengeksplorasi lautnya agar potensi kelautannya diketahui dan dimanfaatkan dunia secara keseluruhan. Adapun bentuk tanggung jawab berdasarkan peran Indonesia tersebut menghasilkan hubungan berkelanjutan antar kedua negara di sektor kelautan. Lebih jauh, kebesaran maritim Indonesia membuat kerjasama ini dilandasi rasa hormat, dibuktikan dengan dibahasnya kebijakan masing-masing mengenai hukum laut internasional, sebagai usaha untuk menciptakan kesamaan payung hukum. Pada intinya, tanggung jawab moral Indonesia menciptakan persepsi baik kepada dunia secara umum, dan AS secara khusus.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, kerjasama *Marine Scientific Research* antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam INDEX-SATAL dibayangi oleh resiko bahwa Amerika Serikat memiliki reputasi buruk dalam rezim laut internasional dan cenderung agresif dalam aktivitas eksploitasi sumberdaya alam. Meski demikian, Indonesia tetap menerima kehadiran Amerika Serikat sebagai mitra untuk mengeksplorasi perairan Sangihe-Talaud yang notabene memiliki kekayaan sumberdaya alam disebabkan oleh logika kepantasan.

Reputasi-reputasi buruk Amerika Serikat dapat dijabarkan sebagai berikut: tidak meratifikasi UNCLOS dan oleh karenanya memiliki pemahaman berbeda dengan negara-negara yang dibawah rezim. Menolak konsep *Common Heritage of Mankind* yang dilandasi sifat altruis dan membantu negara berkembang, serta pencemaran laut. Oleh karenanya, penulis beranggapan bahwa landasan dari Indonesia yang menerima Amerika Serikat mengadakan penelitian dan mengeksplorasi lautnya tidak dapat didasarkan pada kalkulasi untung rugi, melainkan hal-hal moralis yang sepatasnya dilakukan.

Berdasarkan pemahaman logika kepantasan, diterimanya Amerika Serikat dilandasi oleh tiga hal, yaitu penyelarasan situasi dan identitas, peran Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCLOS, serta tanggung jawab moral sebagai negara maritim. Adapun bentuk tanggung

jawab moral tersebut menyebabkan AS menghormati Indonesia selaku negara maritim dan menjadi partner kerjasama yang mendukung pembangunan dan perkembangan kelautan Indonesia hingga saat ini.

REFERENSI

- Brittingham, M. A., 2007. *China's Contested Rise: Sino-US Relations and the Social Construction of Great Power Status*. Dalam: *New Dimensions of Chinese Foreign Policy*. Plymouth: Lexington Books.
- Hart, H. L. A., 1968. *Punishment and Responsibility*. Dalam: *Essays in the Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kříž, Z. & Urbanovská, J., 2013. *Slovakia in UN Peacekeeping Operations: Trapped between the Logic of Consequences and Appropriateness*. Brno: Routledge.
- March, J. G. & Olsen, J. P., 2004. *The Logic of Appropriateness*. Oslo: Centre for European Studies, University of Oslo.
- Setiawan, A., 2016. *Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara*. Jakarta: Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Troa, R. A., 2017. *Geodinamika Kawasan Timur Indonesia dan Implikasinya terhadap Potensi Sumberdaya Dasar Laut*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- Yuliati, 2014. *Kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2.
- Nugroho, A. S., 2016. Posisi Amerika Serikat terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional. *Journal of International Relations*, 2(4).
- Satria, F., 2012. Komposisi Jenis dan Penyebaran Ikan Laut-Dalam di Perairan Kepulauan Sangihe dan Talaud Sulawesi Utara. *BAWAL*, IV(3).
- Ambari, L. W., 2013. *Empat Selat Strategis Dunia ada di Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.antaranews.com/berita/398259/empat-selat-strategis-dunia-ada-di-indonesia> [Diakses 28 Agustus 2019].
- Antara News, 2010. *"Rahasia" 4 Ribu Meter Bawah Laut Sangihe*. [Online] Available at: <https://www.antaranews.com/berita/213742/rahasia-4-ribu-meter-bawah-laut-sangihe> [Diakses 5 Juli 2019].
- Brown Political Review, 2018. *Lawless on the High Seas: Why the U.S. Can and Must Ratify UNCLOS*. [Online] Available at: <https://www.brownpoliticalreview.org/2018/12/lawless-high-seas-u-s-can-must-ratify-unclos/> [Diakses 28 Juli 2019].
- CNN, 2011. *Brazil fines Chevron \$28 million for oil spill*. [Online] Available at: <https://edition.cnn.com/2011/11/21/world/americas/brazil-oil-spill/index.html> [Diakses 8 Juli 2019].
- Dharmawan, L., 2017. *Riset Laut-Dalam, Tantangan Pembangunan Maritim RI*. [Online] Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/134727-riset-laut-dalam-tantangan-pembangunan-maritim-ri> [Diakses 3 Juli 2019].
- Embassy of the Republic Indonesia in Washington, 2017. *Bilateral Relations*. [Online] Available at: <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/bilateral-relations/> [Diakses 13 Maret 2019].

- Fears, D., 2018. *Trump Administration Approves Aeismic Tests that Could Harm Thousands of Atlantic Dolphins and Whales.* [Online] Available at: https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/11/30/trump-administration-approves-seismic-tests-that-could-harm-many-thousands-atlantic-dolphins-whales/?utm_term=.223b34c325b4 [Diakses 23 Mei 2019].
- GeoMagz, 2015. *Nodul Polimetalik, Perburuan Masa Depan di Laut.* [Online] Available at: <http://geomagz.geologi.esdm.go.id/nodul-polimetalik-perburuan-masa-depan-di-dasar-laut/> [Diakses 6 April 2019].
- Giyanto, A., 2017. *Siswanto Rusdi: Langgar Hukum Laut Internasional, Amerika Serikat Arogan!* [Online] Available at: <https://maritimeobserver.com/2017/07/siswanto-rusdi-langgar-hukum-laut-internasional-amerika-serikat-arogan/> [Diakses 28 Juli 2019].
- Groves, S., 2012. *The U.S. Can Mine the Deep Seabed Without Joining the U.N. Convention on the Law of the Sea.* [Online] Available at: <https://www.heritage.org/report/the-us-can-mine-the-deep-seabed-without-joining-the-un-convention-the-law-the-sea> [Diakses 7 Juli 2019].
- Guy, N., 2005. *Marine Scientific Research and the Law of the Sea: the Balance between Coastal State and International Rights, Rights and Responsibilities- Time for Rethink.* [Online] Available at: https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf4/GuyPaper.pdf [Diakses 17 November 2018].
- Hammond, S. & Sugiarta, W., 2010. *INDEX-SATAL: A US and Indonesian Partnership to Explore Indonesia's Seas.* [Online] Available at: <https://oceanexplorer.noaa.gov/oceanos/explorations/10index/background/partnership/partnership.html> [Diakses 6 April 2019].
- Holmes, K., 2011. *U.N. sea treaty still a bad deal for U.S.* [Online] Available at: <https://www.heritage.org/defense/commentary/un-sea-treaty-still-bad-deal-us> [Diakses 27 Juli 2019].
- Humas Sekretariat Kabinet, 2016. *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia.* [Online] Available at: <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> [Diakses 23 Agustus 2018].
- ICEL, 2019. *Keanekaragaman Hayati Laut.* [Online] Available at: <https://icel.or.id/tag/keanekaragaman-hayati-laut/> [Diakses 29 Agustus 2019].
- IUCN, 2008. *UNCLOS.* [Online] Available at: <https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/international-ocean-governance/unclos> [Diakses 13 April 2019].
- KEDUBES AS, 2015. *Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim.* [Online] Available at: <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/> [Diakses 28 Juli 2019].
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019. <https://news.kkp.go.id/index.php/peringati-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-as-deklarasikan-penetapan-tiga-kawasan-konservasi-baru-di-perairan-maluku-utara/>. [Online] Available at: <https://news.kkp.go.id/index.php/peringati-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-as-deklarasikan-penetapan-tiga-kawasan-konservasi-baru-di-perairan-maluku-utara/> [Diakses 10 September 2019].
- Kompas, 2003. *Menguak Potensi Dasar Laut Indonesia.* [Online] Available at: <http://lipi.go.id/berita/menguak-potensi-dasar-laut-indonesia/89> [Diakses 23 Agustus 2018].
- Mansur, A., 2014. *RI – AS Kerja Sama Berantas IUU Fishing.* [Online] Available at: <http://www.neraca.co.id/article/44215/RI--AS-Kerja-Sama-Berantas-IUU-Fishing> [Diakses 27 Juli 2019].
- Maritim, 2018. *Indonesia dan Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Kemaritiman.* [Online] Available at: <https://maritim.go.id/indonesia-dan-amerika-serikat-pererat-kerja-sama-kemaritiman/> [Diakses 28 Juli 2019].

- McDowell, R., 2010. *Deep-sea Images Reveal Colorful Life off Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.ctvnews.ca/deep-sea-images-reveal-colourful-life-off-indonesia-1.546311> [Diakses 15 September 2019].
- Metro TV News, 2010. *Indonesia Izinkan AS Eksplorasi Laut*. [Online] Available at: <http://lipi.go.id/berita/indonesia-izinkan-as-eksplorasi-laut/5597> [Diakses 6 April 2019].
- Popp, J., 2018. *The Relationship Between Prices of Various Metals, Oil and Scarcity*. [Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/327584339_The_Relationship_Between_Prices_of_Various_Metals_Oil_and_Scarcity [Diakses 9 Juli 2019].
- Rachman, T., 2010. *Enam Gunung Berapi Ditemukan di Perairan Sangihe Talaud*. [Online] Available at: <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/07/27/126824-enam-gunung-berapi-ditemukan-di-perairan-sangihe-talaud> [Diakses 5 Juli 2019].
- Rasyid, A., 2008. *Biota Laut sebagai Sumber Obat-Obatan*. [Online] Available at: [http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxxiii\(1\)11-18.pdf](http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxxiii(1)11-18.pdf) [Diakses 6 Juli 2019].
- Stratfor, 2015. *The U.S. Stakes Its Claim in the Arctic Frontier*. [Online] Available at: <https://worldview.stratfor.com/article/us-stakes-its-claim-arctic-frontier> [Diakses 27 Juli 2019].
- Sulistyo, E., 2016. *Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara*. [Online] Available at: <http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/> [Diakses 29 Juli 2019].
- Teguh, I., 2018. *Ekspedisi Snellius: Upaya Belanda Mengorek Perairan Timur Nusantara*. [Online] Available at: <https://tirto.id/ekspedisi-snellius-upaya-belanda-mengorek-perairan-timur-nusantara-c4ov> [Diakses 29 Agustus 2019].
- Utama, A., 2015. *Indonesia dan Amerika Gali Potensi Kerjasama Sektor Energi*. [Online] Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/kementerian-energi-ri-dan-as-gali-potensi-kerjasama-/2896700.html> [Diakses 28 Juli 2019].
- Valencia, M., 2018. *US 'picking and choosing' from the Law of the Sea*. [Online] Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2018/08/17/us-picking-and-choosing-from-the-law-of-the-sea/> [Diakses 27 Juli 2019].
- Wibowo, A. T., 2010. *Freeport Papua Penyumbang Terbesar ke Amerika*. [Online] Available at: <https://www.viva.co.id/arsip/187651-freeport-papua-penyumbang-terbesar-ke-amerika> [Diakses 8 Juli 2019].
- Wicaksono, P. E., 2017. *50 Tahun Operasi di Papua, Berapa Mineral yang Dikeruk Freeport?*. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2893179/50-tahun-operasi-di-papua-berapa-mineral-yang-dikeruk-freepor> [Diakses 6 April 2019].